

## **Upaya Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Baubau**

**La Ode Syaiful Islamy Hisanuddin <sup>1</sup>, Wa Ode Arsyiah <sup>1\*</sup>, Laode Muhammad Arsal <sup>2</sup>, Zulfan Jamal Akbar <sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

<sup>2</sup> Sosiologi, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

e-mail: [waodearsyiah@unidayan.ac.id](mailto:waodearsyiah@unidayan.ac.id)

\* Corresponding Author

*Received: 15 Oktober 2024*

*Revised: 15 November 2024*

*Accepted: 1 Desember 2024*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Baubau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yaitu menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Baubau yaitu 1) melakukan perencanaan, pariwisata harus melihat potensi yang ada dalam pariwisata. Dalam melakukan perencanaan harus melibatkan semua unsur dari unsur pemerintah, swasta atau LSM maupun unsur masyarakat. Dinas pariwisata berencana membangun SDM Pariwisata dengan melakukan pelatihan-pelatihan dilingkup kampus bagi mahasiswa agar mengenal potensi-potensi pariwisata Kota Baubau 2) Penetapan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui dinas pariwisata telah merancang "Dokumen Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Baubau. 3) Sosialisasi terhadap pengembangan pariwisata kota Baubau sekaligus mengedukasi dengan mengadakan pelatihan Pariwisata. 4) Pemasaran Objek Wisata cara yang dianggap mampu menarik perhatian wisatawan dengan melakukan promosi melalui media sosial karena dijamin sekarang ini masyarakat atau wisatawan tidak terlepas dari media sosial.

**Kata kunci:** upaya pemerintah, pariwisata

### **Abstract**

*This research aims to describe the government's efforts in developing tourism in Baubau City. The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive qualitative research type. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Data analysis uses data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show the government's efforts in developing tourism in Baubau City, namely 1) planning, tourism must look at the potential that exists in tourism. In carrying out planning, all elements from the government, private sector or NGOs and community elements must be involved. The tourism office plans to build tourism human resources by conducting training on campus for students to become familiar with Baubau City's tourism potential. 2) Determination of regulations set by the government through the tourism office has designed the "Revised Document for the Baubau City Regional Tourism Development Master Plan (RIPPARDA). 3) Socialization of the tourism development of the city of Baubau as well as education by holding tourism training. 4) Tourism Attraction Marketing is a method that is considered capable of attracting the attention of tourists by promoting it through social media because nowadays people or tourists cannot be separated from social media.*

**Keywords:** government efforts, tourism

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan adat istiadat dan budaya yang masih kental, menyimpan sejuta nilai kearifan lokal serta menyimpan begitu banyak potensi alam dipadu dengan masyarakat dari berbagai golongan suku, agama dan ras yang hidup berdampingan satu sama lain. Hal inilah yang kemudian menjadi nilai tersendiri Indonesia tak hanya warga Indonesia sendiri yang kagum namun juga dikenal hingga ke mancanegara. Ini pulalah yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan wisata yang begitu di UU No. 10 tahun 2009 pada pasal yang ke 4 menjelaskan tujuan kepariwisataan di Indonesia adalah untuk : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; Meningkatkan kesejahteraan rakyat; Menghapus kemiskinan; Mengatasi pengangguran; Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; Memajukan kebudayaan; Mengangkat citra bangsa; Memupuk rasa cinta tanah air; Memperkokuh jati diri dan kesatuan bangsa; Mempererat persahabatan antarbangsa.

UU No. 32 Tahun 2004 ini secara riil merupakan titik tolak yang sangat strategis bagi daerah untuk dapat menggali, mengembangkan dan mengelola aset-aset yang dimiliki serta memberdayakannya bagi pembangunan perekonomian daerah setempat. Oleh karena itu daerah perlu mencermati sektor-sektor strategis yang memiliki potensi yang kuat untuk menopang pembangunan di daerahnya masing-masing, sehingga dapat mengembangkan Pariwisata.

Nindya Eka Pramila (2017) dengan judul Upaya Pengembangan Pantai Teluk Penyu Sebagai Obyek Wisata Unggulan Di Kabupaten Cilacap Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sumber daya alami yang dimiliki Pantai Teluk Penyu yaitu panorama laut yang indah dan pemandangan Pulau Nusakambangan. 2) Potensi sosial Pantai Teluk Penyu berupa: kehidupan nelayan tradisional, tempat pelelangan ikan, kerajinan kerang, kapal-kapal tanker, perahu-perahu nelayan tradisional dan tegarnya kilang Pertamina. 3) Potensi budaya Pantai Teluk Penyu berupa: Sedekah Laut dan Perahu Naga. 4) Rencana program yang sudah dapat terealisasi adalah penataan kios dengan pembangunan cafeteria. 5) Dinas Pariwisata berupaya menambah sarana dan prasarana dalam hal pendidikan dengan membangun gedung IPTEK. 6) Hambatan pengembangan obyek wisata berupa: dana anggaran yang tidak mencukupi, tanah milik TNI AD, terdapat jalur pipa Pertamina, sulitnya mengatur masyarakat, masih kurangnya rasa memiliki dari masyarakat, tingkat SDM yang rendah dan kurangnya dukungan untuk bekerjasama mengembangkan Pantai Teluk Penyu. 7) Solusi untuk mengatasi hambatan seperti: melakukan usulan pengajuan dana kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap, sosialisai dan pengarahagan tentang pengembangan Pantai Teluk Penyu kepada masyarakat dan menjalin kerjasama setiap tahunnya dengan TNI AD sebagai pemilik lahan obyek wisata. 8) Kondisi obyek wisata Pantai Teluk Penyu sudah sesuai dengan kajian yang ada di RTRW. 9) Kondisi obyek wisata Pantai Teluk Penyu dapat dikatakan sesuai dengan RIPP, namun banyak beberapa program yang belum dapat terealisasi. 10) Kebijakan yang ditetapkan belum dapat dimanfaatkan pengelola secara maksimal..

Kota Baubau mempunyai potensi di bidang pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan, dengan terdapatnya berbagai obyek wisata, baik obyek wisata alam maupun obyek wisata buatan. Mengingat obyek wisata yang ada dan potensinya yang cukup pesat dimasa mendatang. Kota Baubau memiliki beberapa kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah obyek tujuan wisata karena didukung topografi tinggi berbukit dan dataran rendah dekat dengan pantai yang diarahkan sebagai kawasan pendukung pariwisata. Maka bukan tidak mungkin lagi Pemerintah Kota Baubau untuk membuat potensi pariwisatanya dikembangkan dengan mengelolanya menjadi lebih baik sehingga diminati oleh para wisatawan, tidak hanya wisatawan lokal tetapi juga wisatawan asing.

Kota Baubau merupakan kota kaya akan pariwisata yang alami, buatan, seni dan budaya, peninggalan sejarah yang sudah cukup terkenal pariwisata unggulan yang terdapat di kota Baubau diantaranya adalah Benteng Keraton Buton yang terluas didunia, objek wisata seperti Pantai yaitu pantai nirwana, pantai lakeba dan masih banyak lagi. Dan pariwisata yang baru-baru ini terkenal menjadi *viral* seperti hutan pinus yang terletak dikawasan samparona, tempat permandian buatan (kolam renang) pondok Bali blising yang ada di kawasan Ngkaring-ngkaring, pariwisata batu sori yang terlatak palabusa, kampung tenun yaitu rumah-rumah disana di lukis dengan berbagai macam lukisan seperti orang lagi menenun yang terletak dikawasan Topa dan masih banyak lagi. Untuk itu diperlukan sebuah strategi yang matang yang akan mempunyai potensi besar akan berhasil dan membawa dampak perubahan yang lebih baik di berbagai bidang. Di sinilah pentingnya peraturan dan kesadaran dari pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan di sektor pariwisata. Sektor pariwisata memerlukan suatu pola pengembangan kepariwisataan yang terencana atau tersusun agar potensi yang dimiliki bisa dikembangkan secara optimal.

Maka dapat dipahami bahwa kegiatan kepariwisataan merupakan salah satu bidang usaha yang dipandang dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk pengembangan pariwisata di Kota Baubau untuk dijadikan salah satu potensi yang ada dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Banyaknya objek wisata yang ada di kota Baubau menjadi daya tarik tersendiri. Sehingga dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana di tempat tersebut sangat dibutuhkan agar dapat mengembangkan Pariwisata.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Upaya

Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787) Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dapat disimpulkan upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang di harapkan.

Menurut Poerwadarminta (2006:1344), “upaya adalah usaha untuk menyampaikanmaksud,akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya.

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya (Soeharto 2002). Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul (soekamto 1984;237).

Surayin (2001) mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya.

Jenis-jenis upaya yaitu: (1) Upaya preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global. (2) Upaya preservatif yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik. (3) Upaya kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. (4) Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya.

Dari kesimpulan diatas bahwa upaya merupakan suatu usaha terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

### Konsep Pariwisata

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sansekerta yang komponen-komponennya terdiri dari: “Pari” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling; “Wis(man)” yang berarti rumah, properti, kampung, komunitas, dan “ata” berarti pergi terus-terusan, mengembara (*roaming about*) yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan (Gamal Suwanto, 2001:3).

Dalam arti luas, pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktifitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil

masyarakat negara berkembang. Pariwisata semakin berkembang sejalan perubahan-perubahan sosial, budaya, ekonomi, teknologi dan politik. Runtuhnya sistem kelas dan kasta, semakin meratanya distribusi sumber daya ekonomi, ditemukannya teknologi transportasi dan peningkatan waktu luang yang didorong oleh penciptaan jam kerja telah mempercepat mobilitas manusia antar daerah, negara dan benua khususnya dalam hal pariwisata.

Menurut S. Nyoman Pendit (2006:32) Pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya, seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga termasuk sebagai industri. Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, mendefinisikan pariwisata sebagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Dengan kata lain pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan terencana yang dilakukan secara individu maupun berkelompok dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan. Dengan demikian pariwisata meliputi: (1) Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata. (2) Penggunaan objek dan daya tarik wisata, seperti : kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah : keindahan alam, gunung berapi, danau dan pantai. (3) Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu : usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultan pariwisata), usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar dan angkutan wisata.

Organisasi pariwisata dunia, UNWTO, mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang di luar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis, atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja di tempat yang dikunjunginya tersebut. Pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal disitu untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara (Liga Suryadana dan Vanny Octavia, 2015).

Menurut I Gede Pitana (2005) pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana, atau untuk mendapat perjalanan baru. Pariwisata dalam arti sempit adalah lalulintas orang-orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu, untuk berpesiar di tempat lain semata-mata sebagai konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan, guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil suatu pengertian pariwisata yaitu suatu kegiatan perjalanan yang melibatkan orang-orang dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu yang baru dalam kurun waktu tertentu dan bukan mencari nafkah, dan juga dapat menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Menurut I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Wdyatmaja (2017) Adapapun bentuk-bentuk pariwisata yang dikategorikan berdasarkan: (a) Menurut asal wisatawan; Bentuk pariwisata menurut asal wisatawan dibagi menjadi dua jenis yaitu pariwisata dalam negeri dan pariwisata luar negeri. Pariwisata dalam negeri atau pariwisata domestik adalah perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam lingkungan di wilayah negaranya sendiri. Sedangkan pariwisata internasional atau pariwisata luar negeri adalah sebuah perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang antar negara atau di luar negara asalnya. (b) Menurut Pengangkutan; Yang dimaksud sebagai pengangkutan berupa alat pengangkutan yang digunakan wisatawan yang dikategorikan dalam pariwisata udara, laut, kereta api, mobil, dan lain-lain. Alat angkut yang dipilih tentunya bergantung kepada kondisi finansial wisatawan dan juga pada kondisi kesehatannya. (c) Menurut Jangka Waktu; Kedatangan dari seseorang atau sekelompok wisatawan di suatu negara akan diperhitungkan menurut lamanya sekelompok atau seseorang itu tinggal di negara tujuan. Hal ini memunculkan istilah pariwisata jangka panjang dan jangka pendek. (d) Menurut Jumlah Wisatawan; Menurut jumlah wisatawan ini maksudnya adalah perbedaan jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu negara, dilakukan perseorangan atau sekelompok. Hal ini juga memunculkan istilah pariwisata tunggal maupun pariwisata kelompok.

Pariwisata dapat dipelajari tidak hanya dari segi motivasi dan tujuan perjalanannya saja, tetapi juga bisa dilihat dari kriteria lain misalnya bentuk-bentuk pariwisata yang dilakukan,

lamanya perjalanan serta pengaruh-pengaruh ekonomi akibat adanya perjalanan wisata tersebut. Menurut Spillane (2006) bentuk-bentuk pariwisata dikategorikan sebagai berikut :

#### Pariwisata individu dan kolektif

Baik pariwisata dalam negeri maupun luar negeri dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *Individual tourish* atau pariwisata perorangan dan *Organized collective tourish* atau pariwisata kolektif yang diorganisasi secara baik. Kategori pertama meliputi seseorang atau kelompok orang (teman-teman atau keluarga) yang mengadakan perjalanan wisata dengan melakukan sendiri pilihan daerah tujuan wisata maupun pembuatan programnya sehingga bebas pula mengadakan perubahan-perubahan setiap waktu dikehendaki. Seseorang maupun kelompok orang tersebut melakukan sendiri semua persiapan dalam rangka mendapatkan perlengkapan serta jasa-jasa yang diperlukan

Kategori kedua meliputi biro perjalanan (*travel agent* atau *tour operator*) yang menjual suatu perjalanan menurut program dan jadwal waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk keseluruhan anggota kelompok yang dimaksud diatas. Biro perjalanan ini menawarkan kepada siapa saja yang berminat dengan keharusan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan untuk keperluan seluruh perjalanan tersebut. Peserta *organized tour* ini dibebaskan dari segala macam pengurusan karena baik perlengkapan maupun jasa-jasa lain yang diperlukan telah disediakan oleh penyelenggara perjalanan. Alternatif lain adalah bila ada sebuah biro perjalanan yang mengorganisasi *individual trips* untuk seorang atau lebih tanpa harus ikut serta dalam kelompok seperti tersebut diatas atau mungkin juga biro perjalanan mengorganisasi *affinity groups* atau kelompok gabungan sehingga memungkinkan untuk memanfaatkan keringanan biaya udara *fincentive fareset*.

#### Pariwisata jangka pendek, pariwisata jangka panjang dan pariwisata eksekursi

Pembagian menurut lamanya perjalanan dibedakan atas pariwisata jangka panjang dimaksudkan sebagai suatu perjalanan yang berlangsung beberapa minggu atau beberapa bulan bagi wisatawan sendiri. Ini mempunyai arti penting bagi tempat-tempat yang dikunjungi. Lebih-lebih bila terjadi pada *pleasure tourism* atau *cultural tourism*. Selama ini sudah ada *pleasure tourism* sebagai akibat meningkatnya mobilitas wisatawan modern sekarang. Terutama yang menggunakan kendaraan bermotor. Akan tetapi, *pleasure trips* adalah kategori jangka waktu maupun pada umumnya mencakup kunjungan ke berbagai negara yang terdiri atas kunjungan serta singgah hanya dalam waktu pendek disetiap kota atau negara-negara yang dikunjungi.

Pariwisata jangka pendek atau *short term tourish* mencakup perjalanan yang berlangsung antara satu minggu sampai sepuluh hari. Secara sosiologis, hal tersebut adalah bentuk perjalanan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang tidak dapat mengambil liburan panjang. Pariwisata eksekursi atau *excursionist tourism* adalah suatu perjalanan wisata yang tidak lebih dari 24 jam dan tidak menggunakan fasilitas akomodasi. Bentuk ini sangat menyolok bagi daerah-daerah perbatasan.

#### Pariwisata dengan alat angkutan

Ada berbagai bentuk pariwisata dengan alat angkutan yang dipakai misalnya kereta api, kapal laut, kapal terbang, bus dan kendaraan umum lainnya. Wisatawan yang berjalan kaki atau *pedestrian tourism (hikers)* sampai sekarang masih banyak penggemarnya.

#### Pariwisata aktif dan pasif

Untuk mempelajari pariwisata internasional dan pengaruhnya terhadap neraca pembayaran. Kedatangan wisatawan asing yang membawa devisa untuk suatu negara merupakan bentuk pariwisata yang sering disebut *active tourism (receptive tourism)*. Sedangkan penduduk suatu negara yang pergi ke luar negeri dan membawa uang ke luar negeri dan yang mempunyai pengaruh negatif terhadap neraca pembayaran merupakan *passive touris*.

### **Konsep Pengembangan Pariwisata**

Menurut Oka A.Yoeti (1996:78), pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat, baik juga dari segi ekonomi, sosial dan juga budaya. Pengembangan pariwisata tersebut terdiri dari:

### Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata

Dalam mengembangkan destinasi pariwisata, kegiatan dalam hal pencitraan merupakan hal yang penting dilakukan untuk destinasi yang baru akan dikembangkan. Ada dua hal dalam mengembangkan citra destinasi pariwisata wisata yang perlu dilakukan. Pertama, yaitu mencari potensi yang unik dan berbeda yang tidak dimiliki oleh destinasi wisata lain dan yang kedua melakukan pencitraan kawasan dan juga tematik pada setiap kluster. Inovasi-inovasi baru dalam produk dan penawaran paket, setiap tahunnya perlu di evaluasi sebagai bahan untuk penyusunan strategi tahun berikutnya.

### Strategi Pengembangan Pemasaran

Kegiatan dalam pengembangan pemasaran wisata seperti promosi penting untuk dilakukan dalam mengidentifikasi sumber-sumber wisatawan potensial yang dapat dijadikan lokasi penyebaran informasi pariwisata, seperti :

#### *Mengidentifikasi Sumber-sumber Wisatawan yang potensial*

Sumber wisatawan yang potensial penting untuk dilakukan sebagai pusat penyebaran informasi pariwisata agar efektif dan efisien. Strategi ini dimulai dengan kajian khusus tentang pasar, dimana dapat dilakukan pada saat pemerintah daerah mengikuti ajang promosi di luar negeri dengan menyebarkan angket. Sementara untuk dalam negeri beberapa kota penting seperti Bali, Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta, merupakan sumber pasar baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Wisatawan lain yang potensial adalah generasi millennial, seperti dengan cara menyebarkan informasi destinasi wisata melalui sosial media.

#### *Merancang materi dan media promosi yang informatif, efektif, dan efisien*

Merancang bahan promosi yang baik menjadi faktor penting dalam promosi wisata. Strategi ini diarahkan untuk membuat materi promosi yang menarik dengan informasi yang memadai agar dapat dijadikan referensi kunjungan calon wisatawan sebelum berkunjung. Informasi tersebut berisi mengenai deskripsi destinasi yang ada, rute transportasi, serta akomodasi selama berwisata yang tersebar di event-event pariwisata maupun web dan sosial media seperti instagram dan facebook.

### Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pengembangan kelembagaan mengharuskan bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan partisipasi semua pihak dalam pengembangan pariwisata. Organisasi dalam sebuah kelembagaan berfungsi untuk mengerahkan dan memobilisasi seluruh sumberdaya yang tersedia untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi dasarnya, sehingga pariwisata mampu menjadi penggerak pembangunan.

#### *Kelembagaan Fungsional*

Kelembagaan yang fungsional menjadi prasyarat bekerjanya sistem pariwisata. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kelembagaan di sektor swasta dan masyarakat Kabupaten Tulungagung, perlu dilaksanakan strategi menyusun kelembagaan yang fungsional. Empat pertanyaan tentang berfungsinya kelembagaan pariwisata adalah: (a) Siapa melakukan; (b) Apa dengan cara; (c) Bagaimana; dan (d) Mengapa/Untuk apa.

Pertanyaan “siapa”, menunjuk kepada pihak yang mempunyai “kepentingan” langsung atau mempunyai “kompetensi”. Pertanyaan “apa” menunjuk pada kegiatan pokok yang dilakukan oleh setiap aktor (siapa). Pertanyaan “bagaimana” berasosiasi dengan “metode” pelaksanaan kegiatan. Pertanyaan “mengapa/untuk apa” menunjuk pada “output” kegiatan.

Suatu visi yang ingin menjadikan pariwisata sebagai ekonomi unggulan daerah misalnya, membawa implikasi yang luas bagi pembentukan kelembagaan, karena akan banyak institusi yang harus dilibatkan dan banyak pula peraturan perundang-undangan yang perlu dipedomani dan diciptakan. Tidak saja jumlah, tetapi model, tupoksi (tugas pokok dan fungsi), dan cakupan kelembagaan juga harus diciptakan. Dalam tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah misalnya, akan muncul kompleksitas kelembagaan akibat tuntutan untuk memperluas jaringan teknis manajemen dari sekedar lintas-sektoral menuju lintas teritorial.

#### *Pengembangan sumber daya manusia*

Strategi pengembangan sumberdaya manusia harus menjangkau seluruh SDM baik yang ada di pemerintah, swasta maupun masyarakat. Seperti pelatihan-pelatihan untuk kelompok masyarakat tentang kepariwisataan, kesediaan untuk mengonservasi kawasan,

kesediaan untuk mengorganisasi diri (*self-organizing*) sehingga mereka menjadi salah satu pemangku kepentingan yang suportif, pemahaman tentang daya dukung ekonomi dan lingkungan, hingga pelatihan ekonomi kreatif yang menciptakan diversifikasi usaha ekonomi kawasan, semuanya merupakan agenda yang secara bersamaan perlu diimplementasikan untuk meningkatkan mutu SDM.

Untuk memperkuat kapasitas SDM maka kegiatan pelatihan perlu didesain secara tepat. Cara pertama adalah mendesain kurikulum yang jelas dan berorientasi kerja. Artinya, pelatihan tidak bersifat insidental tanpa evaluasi dan reformulasi. Sebaliknya ia dilakukan secara terus-menerus dengan sasaran kelompok yang jelas dan output yang terukur secara objektif. Masyarakat setempat harus dilihat sebagai “siswa” yang wajib mengikuti pelatihan yang kurikulumnya berbasis kompetensi. Kompetensi tersebut harus aplikatif dan relevan. Salah satu target pelatihan tersebut adalah untuk membentuk kelompok-kelompok trampil di berbagai unit usaha. Yang nantinya kelak dapat menjadi percontohan bagi warga masyarakat untuk menemukan potensi-potensi ekonomi yang tersedia, misalnya, pelatihan produksi cendera mata, pengelolaan usaha jasa secara profesional, pemanduan dan lain sebagainya.

Menurut Bambang Sunaryo (2013:159) kerangka pengembangan destinasi pariwisata paling tidak harus mencakup komponen-komponen utama sebagai berikut, yaitu: (1) Objek dan daya tarik (*Attractions*) yang mencakup daya tarik yang bisa berbasis utama pada kekayaan alam, budaya maupun buatan/*artificial* seperti *event* atau yang sering disebut minat khusus. (2) Aksesibilitas (*Accessibility*) yang mencakup dukungan sistem transportasi yang meliputi rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan dan mode transportasi yang lain. (3) Amenitas (*Amenities*) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata yang meliputi akomodasi, rumah makan, retail, toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, bis perjalanan, pusat informasi wisata dan fasilitas kenyamanan lainnya. (4) Fasilitas pendukung (*Ancillary Services*) yaitu ketersediaan fasilitas pendukung yang digunakan oleh wisatawan seperti bank, telekomunikasi, pos, rumah sakit dan sebagainya. (5) Kelembagaan (*Institutions*) yaitu terkait dengan keberadaan dan peran masing-masing unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata termasuk masyarakat setempat sebagai tuan rumah.

Menurut Gamal Suwanto (2004:95) ada beberapa manfaat pengembangan pariwisata, yaitu: (1) Bidang ekonomi, yaitu dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai peluang besar untuk mendapatkan devisa dan dapat mendukung kelanjutan pengembangan di sektor lain, dengan belanja wisatawan akan meningkatkan pendapatan dan pemerataan dalam masyarakat setempat baik secara langsung maupun tidak langsung, meningkatkan penjualan barang-barang lokal keluar, karena kunjungan wisatawan cenderung tidak terpusat di kota melainkan pesisir dengan demikian sangat berperan dalam menunjang pembangunan daerah. (2) Bidang sosial dan budaya, dengan keanekaragaman sosial budaya merupakan modal dasar bagi pengembangan pariwisata. Oleh karena itu harus mampu melestarikan dan mengembangkan budaya yang ada. (3) Bidang lingkungan hidup, karena pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk pariwisata pada dasarnya adalah lingkungan yang menarik, maka perkembangan wisata alam dan lingkungan senantiasa menghindari dampak kerusakan lingkungan hidup, melalui perencanaan yang teratur dan terarah.

Dalam pengembangannya tentu harus diperhatikan hal-hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan pariwisata ini. Oka A. Yoeti (1996:181) mengatakan bahwa prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang, sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam. Prasarana tersebut antara lain: (1) Perhubungan : jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut, terminal. (2) Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih. (3) Sistem telekomunikasi, baik itu telepon, telegraf, radio, televisi, kantor pos dan lain-lain. (4) Pelayanan kesehatan, baik puskesmas atau rumah sakit. (5) Pelayanan keamanan, baik pos satpam penjaga objek wisata maupun pos-pos polisi untuk menjaga keamanan disekitar objek wisata. (6) Pelayanan wisatawan, baik berupa pusat informasi atau kantor pemandu wisata. (7) Pom bensin. (8) Dan lain-lain.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat kemudian disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata harus memperhatikan beberapa aspek yaitu objek dan daya tarik dalam hal ini objek wisata yang dituju apakah mempunyai daya tarik atau tidak, tentu objek wisata yang akan dituju ini harus didukung beberapa hal diantaranya akses menuju objek wisata apakah layak atau tidak kemudian fasilitas penunjang seperti akomodasi, rumah makan, fasilitas biro perjalanan di sekitar objek wisata apakah tersedia atau tidak kemudian fasilitas pendukung seperti bank dan rumah sakit apakah memadai atau tidak dan tentunya dipengaruhi oleh keadaan masyarakat setempat. Kemudian apabila hal ini telah tersedia dan dikembangkan



dengan baik maka dapat dipastikan manfaat pariwisata di bidang ekonomi, sosial budaya serta lingkungan hidup dapat tercapai dengan baik.

### **Aktor Yang Berperan Dalam Pengembangan Pariwisata**

Menurut Koiman (2009:273) *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Good governance* adalah sebuah gambaran ideal tentang bagaimana mengelola negara dan aspek-aspek terkait lain yang ada di dalamnya. Untuk mewujudkan *good governance*, diperlukan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik dan handal, yakni manajemen yang kondusif, responsif dan adaptif. Untuk dapat dikatakan sebagai *good governance*, maka tidak boleh ada satu pihak yang memegang kontrol penuh atas semuanya, sehingga tercipta keseimbangan antar para *stakeholders* dengan memegang prinsip-prinsip dasar.

Dalam sistem Kepariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Menurut I Gede Pitana dan Putu Gede Gayatri (2005) Secara umum insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu: (1) Pemerintah, (2) Swasta, (3) Masyarakat.

#### **Pemerintah**

Pemerintah adalah sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat serta melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara.

Secara etimologi, pemerintahan dan pemerintah dapat diartikan sebagai berikut: (a) Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. (b) Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. (c) Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintah di Indonesia, dibagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku pada masing-masing negara dan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa: (a) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (b) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga dikatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Inu Kencana Syafie (2013:83) dalam melakukan otonomi daerah perlu adanya asas yang harus dijalankan, yaitu sebagai berikut: (a) Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. (b) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi). (c) Tugas pembantuan. Dalam hal ini pemerintah daerah ikut serta mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.

Adapun Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah, sebagai berikut: (a) Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan; (b) Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; (c) Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan (d) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.



Selanjutnya, juga diatur pada pasal 30 Undang-Undang Kepariwisata mengenai wewenang Pemerintah kabupaten/kota dalam hal kepariwisataan, yaitu: (a) Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; (b) Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; (c) Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; (d) Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; (e) Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; (f) Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; (g) Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; (h) Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; (i) Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; (j) Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; (k) Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

#### Swasta

Swasta dalam ekonomi suatu negara terdiri dari segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah. Organisasi nirlaba maupun laba dapat termasuk swasta, antara lain perusahaan, korporasi, bank, dan organisasi non-pemerintah lainnya, termasuk juga karyawan yang tidak bekerja untuk pemerintah. Dalam sektor ini, faktor-faktor produksi dimiliki oleh individu atau pribadi. Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.

Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena perannya sebagai peluang untuk perbaikan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal kepariwisataan, setiap pengusaha pariwisata memiliki kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepariwisata, yaitu: (a) Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; (b) Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab; (c) Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; (d) Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; (e) Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; (f) Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; (g) Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; (h) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; (i) Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; (j) Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; (k) Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; (l) Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; (m) Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai harapan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama manusia yang mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu: (1) manusia hidup bersama, (2) bercampur atau bersama-sama untuk jangka waktu yang cukup lama, (3) menyadari bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, (4) mematuhi norma-norma peraturan yang menjadi kesepakatan bersama, (5) menyadari bahwa mereka bersama-sama diikat oleh perasaan diantara para anggota satu dengan yang lainnya, (6) menghasilkan kebudayaan tertentu (Abdulsyani, 2002).

Menurut Koentjaraningrat (1996:131), masyarakat didefinisikan sebagai berikut: merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Melihat definisi tersebut di atas, maka tidak semua kesatuan manusia yang saling berinteraksi merupakan masyarakat. Oleh karena masyarakat harus memiliki ikatan/persyaratan khusus seperti tersebut di atas, maka makin besar dan kompleks masyarakat, makin banyak jumlah kelompok dan perkumpulan yang ada di dalamnya. Koentjaraningrat juga mengistilahkan masyarakat sebagai komunitas. Sifat dari komunitas adalah adanya wilayah, cinta (keterikatan) terhadap wilayah, serta keterikatan itu merupakan dasar dari perasaan patriotisme, nasionalisme dan lain-lain.

Setiap orang (masyarakat) berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Setiap orang (masyarakat) berkewajiban menjaga dan

melestarikan daya tarik wisata dan membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan dan analisis data bersifat induktif guna memperoleh hasil penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2011:8). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memaparkan upaya Pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kota Baubau

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak bulan Juni sampai dengan Agustus 2022 yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kota Baubau

### **Target/Subjek Penelitian**

Untuk menentukan jumlah informan dalam penelitian ini, sebelumnya ditentukan *key informan* dalam penelitian ini, dimana seorang *key informan* diambil berdasarkan kriteria tertentu.

### **Prosedur**

Arikanto dalam Syaril. H, (2015:37) menyebutkan bahwa sumber data adalah subjek dimana data diperoleh, apabila penelitian menggunakan kuessioner dalam pengumpulan data maka sumber data tersebut adalah responden. Sedangkan apabila penelitian menggunakan wawancara untuk pengumpulan data maka sumbernya adalah informan, dan apabila peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan dokumentasi maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber datanya. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan wawancara kepada masyarakat dan pemerintah yang memberikan respon serta perannya terhadap pengembangan pariwisata Kota Baubau.

### **Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. (1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2010:91). Data primer ini berupa hasil wawancara, dan observasi dilapangan. Data primer dapat diperoleh melalui informasi langsung dari Kasi Pengembangan pariwisata, Kasi bidang pemasaran dan Kasi pengembangan sumberdaya manusia, serta staff badan pendapatan daerah Kota Baubau. (2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitiannya, melalui penelusuran sumber-sumber tertulis seperti buku-buku literature, majalah, jurnal, dokumentasi dan laporan hasil penelitian yang relevan (Azwar, MA (2010:91).

Menurut Sugiyono (2011:223) dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. (1) Observasi; Teknik observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari keadaan yang ingin diamati, yaitu respon dan peran masyarakat dan pemerintah terhadap objek wisata. Observasi dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian. Melalui teknik observasi langsung dikumpulkan data dengan mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak serta pola perilaku subjek penelitian. Observasi dilaksanakan langsung di lokasi penelitian. (2) Wawancara; Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan orang yang menjadi sumber data untuk memperoleh gambaran mengenai respon dan peran masyarakat dan pemerintah. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang dilakukan dipandu dengan menggunakan bantuan pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang dibuat tidak mengikat jalannya wawancara, tetapi pedoman wawancara yang dibuat adalah sebagai pengontrol (pegangan) untuk fokus kepada pokok persoalan. Jadi pelaksanaan wawancara sendiri tidak bersifat kaku. Pengembangan materi wawancara dikembangkan dengan baik tidak lepas dari pedoman wawancara yang sudah dibuat. (3) Dokumentasi; Pengumpulan data dalam dokumentasi ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, dilakukan penelusuran data historis objek

peneliti serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Dokumen yang diteliti dalam penelitian ini merupakan dokumen yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata di Kota Baubau.

### **Teknik Analisis Data**

Menurut Mudjiarahardjo (dalam Sujarweni, 2014:34), analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam sugiyono, 2011:247-253) sebagai berikut: (1) Reduksi data (*data reduction*); Dalam penelitian kualitatif reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. (2) Penyajian data (*data display*); Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (3) Penarikan Kesimpulan; Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara tersebut perlu diverifikasi. Kemudian kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Baubau**

Melakukan perencanaan

Pemerintah adalah sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat serta melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan Kepariwisata sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.

potensi wisata adalah segala yang dimiliki oleh suatu daya tarik wisata dan berguna untuk mengembangkan industri di daerah tersebut. Potensi wisata menurut Pendit merupakan segala sesuatu yang didapat di daerah tujuan wisata atau *tourist resort*. Daerah tujuan wisata adalah tempat yang karena atraksinya, situasi alam hubungan lalu lintas dan fasilitas kepariwisataan menyebutkan tempat atau daerah tersebut menjadi objek kunjungan wisatawan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat simpulkan bahwa Dalam melakukan perencanaan pariwisata harus melihat potensi yang ada dalam pariwisata. Kota Baubau memiliki potensi wisata alam dan wisata buatan, wisata alam berupa Pantai Nirwana, Pantai Lakeba dan lainnya. sedangkan wisata buatan beberapa kolam renang yang ada di kelurahan Ngkaring-Karing dan masih banyak lagi. Dalam melakukan perencanaan harus melibatkan semua unsur dari unsur pemerintah, swasta atau LSM maupun unsur masyarakat sekitar yang terkena dampak objek wisata seperti pemilik lahan, tokoh adat.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melakukan penelitian di lapangan Dalam melakukan perencanaan pariwisata yang terlibat adalah orang-orang mempunyai kepentingan dalam perencanaan objek wisata tersebut seperti pemilik lahan, unsur pemerintah dan kelompok-kelompok yang bergerak dalam pengelolaan pariwisata

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti dapat disimpulkan bahwa Dalam melakukan perencanaan pariwisata harus melihat potensi yang ada dalam pariwisata. Kota Baubau memiliki potensi wisata alam dan wisata buatan, Dalam melakukan perencanaan harus melibatkan semua unsur dari unsur pemerintah, swasta atau LSM maupun unsur masyarakat sekitar yang terkena dampak objek wisata seperti pemilik lahan, tokoh adat.

Menetapkan regulasi

Peran pemerintah dalam membuat regulasi merupakan salah satu faktor terpenting seperti: undang-undang kepariwisataan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan

perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata, perraturan-peraturan tentang retribusi serta peraturan-peraturan lainnya dengan adanya regulasi atau undang-undang ini maka tentunya semua kegiatan yang berhubungan dengan kepariwisataan akan berjalan dengan tertib dan lancar sesuai apa yang diharapkan.

Dasar hukum pengembangan pariwisata di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Dimana pada pasal 6 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa sebagaimana dimaksud manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta hubungan manusia untuk berwisata. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat simpulkan bahwa Untuk regulasi pengembangan pariwisata yaitu berpatokan dari undang-undang kepariwisataan tahun 2009 kami kota baubau telah membuat “Dokumen Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Baubau. Tahun 2020 Dokumen tersebut telah memuat semua potensi maun gambaran umum pariwisata kota baubau dan mencakup mengenai pengembangan objek wisata yang ada di kota Baubau

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melakukan penelitian di lapangan Penetapan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui dinas pariwisata telah merancang “Dokumen Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Baubau. Dokumen tersebut telah memuat semua potensi maupun gambaran umum pariwisata Kota Baubau

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti dapat disimpulkan bahwa Penetapan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui dinas pariwisata telah merancang “Dokumen Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Baubau. Dokumen tersebut telah memuat semua potensi maupun gambaran umum pariwisata Kota Baubau

#### Melakukan sosialisasi

Melakukan sosialisasi dapat memberikan semua informasi tentang apa yang ingin diberikan kepada seluruh masyarakat. Pengembangan pariwisata adalah salah satu cara untuk membuat suatu objek wisata menjadi menarik dan dapat membuat para pengunjung tertarik untuk mengunjunginya. Pengembangan pariwisata adalah salah satu cara untuk membuat suatu objek wisata menjadi menarik dan dapat membuat para pengunjung tertarik untuk mengunjunginya. Pengembangan pariwisata, peningkatan ekonomi, kesempatan kerja, perubahan gaya hidup semuanya muncul bersamaan. Semuanya erat hubungannya dengan perubahan lingkungan fisik yang akan terjadi. Semua itu akan berakibat eksploitasi berlebihan terhadap keberadaan sumber daya fisik lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat simpulkan bahwa untuk sosialisasi terhadap pengembangan pariwisata kota Baubau kami dari pemerintah memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok masyarakat dari masing-masing kelurahan untuk menghadiri pelatihan Pariwisata untuk mengenai dan memberikan informasi pengembangan dari beberapa narasumber yang ahli dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata dalam hal ini kelompok-kelompok tersebut dapat memberikan informasi kepada orang lain terkait pengembangan pariwisata.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melakukan penelitian di lapangan Sosialisasi pengembangan pariwisata tidak begitu aktif terkadang oknum pemerintah jalan sendiri tanpa melihat atau melibatkan masyarakat dalam sosialisasi pengembangan pariwisata

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti dapat disimpulkan bahwa sosialisasi terhadap pengembangan pariwisata kota Baubau kami dari pemerintah memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok masyarakat dari masing-masing kelurahan untuk menghadiri pelatihan Pariwisata untuk mengenai dan memberikan informasi pengembangan dari beberapa narasumber yang ahli dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata dalam hal ini kelompok-kelompok tersebut dapat memberikan informasi kepada orang lain terkait pengembangan pariwisata. Akan tetapi ada oknum pemerintah jalan sendiri tanpa melihat atau melibatkan masyarakat dalam sosialisasi pengembangan pariwisata

#### Melakukan Pemasaran Objek Wisata

Pemasaran destinasi pariwisata adalah aktivitas destinasi pariwisata dalam menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan dan menukarkan segala penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan dan dengan memberikan keuntungan serta tetap bertanggung-jawab terhadap masyarakat secara luas.

Objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan, tentu mereka menginginkan lokasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, bukan hanya atraksi yang ditampilkan dari objek wisata akan tetapi sarana dan prasarana yang ada di kawasan objek wisata. Sarana prasarana kepariwisataan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan datang ke objek wisata.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat simpulkan bahwa Pemasaran Objek Wisata yang dilakukan adalah dengan mengaktifkan akun media sosial yang ada seperti akun dari dinas pariwisata kota mempromosikan semua Objek wisata dikota baubau untuk mengajak wisatawan lokal maupun wisatawan asing dengan cara tersebut dianggap mampu menarik perhatian wisatawan karena dijamin sekarang ini masyarakat atau wisatawan tidak terlepas dari media sosial.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melakukan penelitian di lapangan Pemasaran Objek Wisata selain memasarkan melalui mulut ke mulut atau dari objek wisata tersebut cara yang dianggap mampu dengan melakukan promosikan melalui media sosial

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti dapat disimpulkan bahwa Pemasaran Objek Wisata selain memasarkan melalui mulut ke mulut atau dari objek wisata tersebut cara yang dianggap mampu dengan melakukan promosikan melalui media sosial karena dijamin sekarang ini masyarakat atau wisatawan tidak terlepas dari media sosial.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, adapun kesimpulan adalah sebagai berikut: Upaya Pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kota Baubau; (1) Melakukan perencanaan; Dalam melakukan perencanaan pariwisata harus melihat potensi yang ada dalam pariwisata. Kota Baubau memiliki potensi wisata alam dan wisata buatan, Dalam melakukan perencanaan harus melibatkan semua unsur dari unsur pemerintah, swasta atau LSM maupun unsur masyarakat sekitar yang terkena dampak objek wisata seperti pemilik lahan, tokoh adat. Dalam agenda pada saat ini dinas pariwisata merencanakan mengadakan pelatihan bagi mahasiswa terkait pelatihan dasar SDM Kepariwisata. (2) Menetapkan regulasi; Penetapan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui dinas pariwisata telah merancang "Dokumen Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Baubau. Dokumen tersebut telah memuat semua potensi maupun gambaran umum pariwisata Kota Baubau. (3) Melakukan sosialisasi; Sosialisasi terhadap pengembangan pariwisata kota Baubau kami dari pemerintah memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok masyarakat dari masing-masing kelurahan untuk menghadiri pelatihan Pariwisata mengenai SDM Kepariwisata bagi mahasiswa dan memberikan informasi pengembangan dari beberapa narasumber yang ahli dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata dalam hal ini kelompok-kelompok tersebut dapat memberikan informasi kepada orang lain terkait pengembangan pariwisata. Akan tetapi ada oknum pemerintah jalan sendiri tanpa melihat atau melibatkan masyarakat dalam sosialisasi pengembangan pariwisata. (4) Melakukan pemasaran objek wisata; Pemasaran Objek Wisata menarik perhatian wisatawan yang dilakukan pemerintah dengan melakukan promosikan melalui media sosial yaitu akun instagram @dinaspariwisatabaubau karena dijamin sekarang ini masyarakat atau wisatawan tidak terlepas dari media sosial.

### **Saran**

Dari kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: (1) Kerjasama dari berbagai pihak dalam rangka pengembangan pariwisata kota Baubau dari pemerintah, swasta, pengelola dan wisatawan. (2) Untuk pemerintah harus mendukung pengelola dengan para pihak pemilik lahan dengan memberikan kemudahan dalam persuratan atau perizinan dikawasan objek wisata seperti memberikan izin untuk mengoperasikan objek wisata. (3) Untuk para pengelola dan para pemilik lahan di kawasan objek wisata agar mengikut semua anjuran pemerintah untuk menjalani semua prosedur yang ada seperti menjalin diskusi bersama pemerintah melalui dinas-dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendapatan Daerah dalam hal pengembangan pariwisata Kota Baubau. (4) Untuk masyarakat bersama agar memperhatikan kawasan objek wisata terkait kenyamanan, keamanan dan kebersihan objek wisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti Nur Sa'idah. 2017. *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)*
- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika : Teori dan Terapan*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Azwar Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Barney, Jay B. 2007. *Gaining and Sustaining Competitive Advantage*. Thirdedition. Pearson Prentice & Hall
- Bambang Sunaryo. 2013. *Destinasi Pariwisata : Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Gava Media
- Burhan Bungin. 2002. *Analisa Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Grant, R.M. 2008. *Contemporary Strategy Analysis (6<sup>th</sup> ed)*. Blackwell Publishing
- Gamal Suwanto. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta : ANDI
- Hadari Nawawi. 2005. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta : Gajah Mada. University Press
- Hunger, J David dan Wheelen, Thomas L. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta : Grasindo
- Herlina Rahman. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : Arifgosita
- I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja. 2017. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Bali : Udayana University Press
- I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : ANDI
- Inu Kencana Syafii. 2012. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- I Gede Pitana dan Putu Gede Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta : Andi
- James J Spillane. 2006. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta : Kanisius
- Koentjaraningrat. 1996. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Koiman, J. 2009. *Modern Governance : New Government-Society Interactions*. SAGE
- M Liga Suryadana dan Vanny Octavia. 2015. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung : Alfabeta
- Mudrajat Kuncoro. 2005. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif?*. Jakarta : Erlangga
- Mustika Diah Pitaloka. 2019. *Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Era Millenial (Studi Kasus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung)*
- Nining Yuningsih. 2015. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Objek Wisata Pantai Pangandaran di Kabupaten Ciamis Jawa Barat*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. (On-Line). tersedia di : <http://lib.unnes.ac.id/51311174/.pdf>
- Oka A Yoeti. 1996. *Pemasaran Pariwisata Terpadu*. Jakarta : Angkasa Bandung
- Priyo Hari Adi. 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. SNA XI Padang
- RIPPARDA, Kota Baubau. 2020. "Dokumen Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Baubau."
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- S. Nyoman Pendit. 2006. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Sarundanjang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Wiratna Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru. Press

Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta : PT Rajawali Grafindo Persada